

TAJUK RENCANA

Menurunkan Biaya Haji Indonesia

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta agar biaya haji Indonesia terus diturunkan, bahkan menargetkan agar bisa lebih murah daripada Malaysia. Ia menyampaikan hal ini saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta pada 4 Mei 2025. Presiden menekankan bahwa penurunan biaya sebesar Rp4 juta tahun ini belum cukup dan meminta jajarannya-termasuk Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji-untuk mencari solusi lebih lanjut.

Presiden menyoroti pentingnya efisiensi di berbagai komponen seperti transportasi, akomodasi, dan katering, serta mendorong diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi agar biaya dan layanan jemaah bisa lebih baik. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik dan menurunkan biaya haji serendah mungkin, dengan harapan Indonesia bisa menjadi negara dengan biaya haji paling terjangkau di kawasan, bahkan mengalahkan Malaysia.

Memang biaya haji reguler 2025 yang dibayarkan langsung oleh jemaah Indonesia turun menjadi sekitar Rp 55,43 juta, dari sebelumnya Rp 56,04 juta di tahun 2024. Total rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 adalah Rp 89,41 juta, turun dari Rp 93,41 juta pada tahun sebelumnya.

Di negeri tetangga, Malaysia, biaya haji untuk kelompok B40 (pendapatan 40% terbawah) adalah sekitar Rp 38,74 juta dengan subsidi pemerintah yang sangat besar. Sedangkan kelompok non-B40 membayar Rp 45,8 juta. Tanpa subsidi, total biaya haji di Malaysia mencapai Rp 100,87 juta. Subsidi pemerintah Malaysia lebih dari 50% dari total biaya, sehingga jemaah membayar jauh lebih murah dibandingkan Indonesia.

Subsidi ini diberikan agar biaya haji lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip kemampuan finansial (istitha'iah) jemaah. Sistem ini dikembangkan oleh Lembaga Tabung Haji (LTH) Malaysia yang mengelola dana

dan penyelenggaraan haji secara terpadu. Memudahkan pemberian subsidi berdasarkan status dan tingkat pendapatan jemaah. Subsidi yang diberikan bisa mencapai lebih dari 50 persen dari total biaya haji, sehingga jemaah B40 membayar jauh lebih rendah dibanding biaya sebenarnya.

Secara keseluruhan, masyarakat menanggapi permintaan Presiden sangat positif. Masyarakat berharap bahwa biaya haji bisa semakin murah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Selain itu, juga mengapresiasi rencana Presiden membangun kampung Indonesia di Arab Saudi untuk jemaah haji dan umrah, juga mendapat perhatian positif. Karena diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus efisiensi biaya selama ibadah di Tanah Suci.

Meski belum ada subsidi langsung berdasarkan kategori ekonomi seperti Malaysia, upaya efisiensi dan pengelolaan dana haji yang baik menjadi kebijakan penting untuk membantu meringankan biaya bagi semua jemaah, termasuk kelompok ekonomi bawah. Selain itu sebenarnya, pemerintah terus berupaya menurunkan biaya haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Salah satunya, Jemaah haji Indonesia mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk dua kali pengiriman barang kiriman dari Arab Saudi dengan nilai maksimal sekitar Rp 24,5 juta per pengiriman. Ini membantu jemaah mengirim barang tanpa biaya bea masuk yang memberatkan, terutama bermanfaat bagi jemaah dengan keterbatasan ekonomi.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana haji, diharapkan secara profesional untuk memberikan manfaat investasi yang dapat menekan biaya yang harus dibayar jemaah, sehingga biaya haji lebih terjangkau dan berkelanjutan. Sehingga lebih banyak umat Islam Indonesia dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih mudah dan layak. (***)-d

Mafia Tanah



BELUM lagi persoalan terkait dengan masalah tanah, yakni Tanah Kas Desa (TKD) di wilayah DIY seperti di wilayah desa Catur Tunggul Maguwoharjo atau di wilayah kapanewon Pakem terselesaikan dengan tuntas, kita dikejutkan lagi dengan adanya kasus tanah yang menimpa Mbah Tupon di wilayah Ngentak Bangunjiwo, Kasihan Bantul dan muncul lagi kasus terbaru yang dialami keluarga Endang Kusumawati, warga padukuhan Tegalrejo RT 04 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Bantul, yang melakukan upaya pemecahan sertifikat tanah miliknya, namun ujung-ujungnya yang muncul adalah status tanahnya dimiliki oleh pihak lain. Padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah miliknya.

Memperhatikan kasus yang terakhir ini, menunjukkan secara nyata bahwa dalam pengaturan sertifikat tanah, yakni hak milik tanah, masih banyak terjadi adanya upaya oknum-oknum tertentu yang melakukan penipuan, guna mengeruk keuntungan pribadi, yang sangat merugikan masyarakat. Padahal di satu sisi pihak pemerintah pusat telah mendorong sedemikian rupa agar masyarakat yang memiliki tanah dapat mengurus dan memiliki sertifikat tanahnya secara jelas.

Sehubungan dengan adanya kasus penipuan dalam pembuatan sertifikat tanah ini, kiranya perlu dilakukan penerapan aturan yang tegas, agar dalam prosesnya tidak terjadi hal-hal seperti di atas, yang notabene biasanya dilakukan oknum tertentu yang justru paham benar akan segala aturan terkait dengan proses pembuatan sertifikat tanah.

Peran Perangkat Desa/Kalurahan

Selanjutnya terkait dengan proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah bagi warga masyarakat di setiap desa atau kalurahan di mana mereka berdomisili, perlu ditegaskan adanya



KR-JOKO SANTOSO

Djati Julitriarsa

para perangkat desa atau kalurahan yang wajib mendampingi dengan semangat melayani masyarakatnya, dengan dilandasi jiwa pengabdian yang tulus demi kesejahteraan warganya. Sehingga tentu saja dalam hal ini para petugas di kantor tersebut mempunyai jiwa melayani warganya tanpa mempunyai niat untuk mencari keuntungan pribadi.

Tentu saja para perangkat atau pamong tersebut dibekali dengan dasar pengetahuan terkait pertanahan, dan mereka bekerja di bawah sumpah jabatannya yang melekat, sehingga abila mereka melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi yang tegas, termasuk sampai pemecatan sebagai pamong desa atau kalurahan.

Maka tidak salah kalau dalam hal ini perlu adanya sosialisasi secara kontinyu yang diberikan oleh desa/kalurahan yang bersangkutan, bekerja sama dengan instansi terkait, yakni Badan Pertanahan kota atau kabupaten, guna memberi penjelasan kepada semua warga yang berkaitan dengan proses pensertifikatan tanah hak miliknya, agar mempunyai status yang jelas. Tentu saja dalam hal ini perlu dijelaskan pula berbagai biaya yang sekiranya akan muncul dalam proses pem-

buatan sertifikat tanah. Hal ini mengingat sampai sekarang banyak ditemukan pembengkakan biaya pembuatan sertifikat tanah, yang harus ditanggung pemilik tanah, yang sebenarnya hal tersebut tidak benar.

Hukum Perlu Ditegakkan

Akhirnya tentu saja agar tidak muncul kembali adanya para mafia tanah, maka sebagai negara yang berlandaskan ada hukum, kiranya perlu sekali penegakan hukum terkait pertanahan itu sendiri. Artinya, bila dalam proses pembuatan sertifikat tanah terjadi adanya upaya oknum tertentu yang melakukan penyimpangan, maka perlu diterapkan aturan hukum yang tegas, dengan menindaknya berdasar hukum yang berlaku. Bila hal itu dilakukan oleh aparat desa atau kalurahan, maka mereka dapat saja diberi saksi seperti pemecatan dari kedudukannya seperti disebutkan di atas. Dengan cara seperti ini, diharapkan negara kita akan benar-benar terhindar dari mafia tanah. Dan tentu saja masyarakat akan semakin sejahtera kehidupannya, karena mereka dapat tinggal di suatu rumah yang lokasi tanahnya sangat jelas statusnya.

Mari kita gaungkan upaya melakukan pemberantasan mafia tanah yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat luas, untuk menuju ke era Indonesia Emas. (*)-d

***Drs Djati Julitriarsa MM,**
*Dosen Purna Tugas LLDikti Wilayah V
Dpk di Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Lithang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkr23@yahoo.com, iklanlkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ”Kedaulatan Rakyat Minggu”... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

’Switch Off’ Media Penyiaran



Hazwan Iskandar Jaya

DALAM beberapa tahun terakhir, lanskap media penyiaran di Indonesia mengalami pergeseran drastis yang mengarah pada kemunduran, baik secara kreatif maupun bisnis. Istilah ”switch off”, yang semula digunakan untuk menandai migrasi dari siaran analog ke digital, kini terasa relevan sebagai metafora bagi situasi sejumlah media penyiaran yang ”dimatikan” oleh realitas baru: gelombang disrupsi digital, lesunya kreativitas konten, dan krisis finansial yang tak terhindarkan.

Fenomena ini terlihat dari banyaknya perusahaan penyiaran yang mengalami penurunan performa. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat adanya lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam industri media, termasuk penyiaran, sejak pandemi COVID-19. Bahkan hingga 2024, tren ini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan, sejak 2020, lebih dari 600 jurnalis diberhentikan, sebagian besar berasal dari media penyiaran. Masalah utama yang membelit media penyiaran adalah stagnasi kreativitas dan ketidakmampuan beradaptasi dengan pola konsumsi media yang berubah.

Di era digital, khalayak tidak lagi bergantung pada televisi untuk mendapatkan informasi atau hiburan. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram menawarkan konten yang cepat, interaktif, dan berbasis algoritma, sehingga lebih personal dan relevan bagi pengguna. Dalam sebuah studi oleh We Are Social (2024), tercatat rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial, jauh lebih banyak dibanding waktu yang digunakan untuk menonton televisi konvensional. Dari sisi bisnis, penurunan pendapatan iklan menjadi pukulan berat. Menurut laporan Nielsen Advertising Intelligence Indonesia, belanja iklan di televisi menurun signifikan sejak 2022, sementara iklan digital terus meningkat tajam.

Artinya, pengiklan mulai mengalih-

Hazwan Iskandar Jaya

kan anggaran mereka ke platform yang menawarkan jangkauan dan efektivitas lebih tinggi dengan biaya lebih rendah. Sayangnya, alih-alih berinovasi, banyak stasiun TV justru memilih jalur aman dengan menayangkan ulang program lama atau konten yang sensasional namun miskin nilai edukatif. Kreativitas ditumpulkan oleh obsesi terhadap rating, padahal cara mengukurnya pun mulai diragukan validitasnya di era multi-screen seperti sekarang. Dalam hal ini, pendapat praktisi media dan mantan Ketua KPI, Judhariksawan, cukup tajam: ”Media penyiaran kita terlalu sibuk mengejar pasar, lupa membentuk selera pasar.”

Namun, apakah ini berarti akhir dari media penyiaran? Tidak juga. Justru inilah saatnya untuk *reboot* totalómenghidupkan kembali kreativitas, mendesain ulang model bisnis, dan mendefinisi peran media penyiaran di era digital.

Ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh. Pertama, Konvergensi Media. Media penyiaran perlu memadukan kekuatan tradisional (*linear broadcasting*) dengan potensi digital. Menyeediakan konten *on-demand* melalui aplikasi atau platform daring bisa menjangkau segmen audiens baru yang lebih muda dan mobile. Kedua, Penguatan Ekosistem Kreatif. Kolaborasi dengan kreator konten independen, rumah produksi lokal, dan komunitas kreatif dapat memicu lahirnya konten orisinal yang segar, relevan, dan bumi. Ketiga, Transformasi Digital Internal. Investasi pada SDM digital, data analytics, dan teknologi produksi berbasis AI harus menjadi prioritas. Hal ini akan membantu media memahami perilaku audiens dan menyesuaikan konten secara lebih akurat. Keempat, Regulasi yang Adaptif. Pemerintah dan lembaga penyiaran perlu menyusun ulang regulasi yang memberi ruang inovasi, namun tetap melindungi

gi nilai kebangsaan, budaya lokal, dan etika siaran. Kelima, Revitalisasi Peran Publik Media. Penyiaran tidak semata soal hiburan dan rating, tapi juga mendidik, memberdayakan, dan mencerdaskan bangsa. Peran ini harus terus ditegaskan dan dipertegas, agar media penyiaran tidak kehilangan ruhnya sebagai *public sphere*.

”Media harus menjadi cermin masyarakat dan jendela masa depan,” ujar pakar komunikasi Dr. Ade Armando. Bila cermin itu retak dan jendela tertutup, masyarakat akan terjebak dalam ruang gelap yang penuh bias dan kebisingan informasi.

Kini, industri penyiaran berada di simpangan jalan. Apakah akan terus larut dalam krisis dan perlahan padam, atau justru menjadikan masa sulit ini sebagai momentum kebangkitan baru? Jawabannya terletak pada keberanian untuk berubah dan kemauan untuk mendengar kembali denyut kebutuhan masyarakat. Senyampang Revisi Undang-Undang Penyiaran sedang dikebut untuk ditetapkan semester ke 2 di tahun 2025 ini. Setelah badai hujan, masih ada harapan pelangi akan muncul! (*)-d

***Hazwan Iskandar Jaya,**
*Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah DIY dan Pengurus Lakpesdam
PWNU DIY.*

Pojok KR

Ada makanan basi dan berulat di program MBG.
- Perlu evaluasi total.

Program belajar Kampus Merdeka diubah menjadi Kampus Berdampak.
- Mudah-mudahan bukan sekadar ganti istilah.

Laporkan, jika ada promosi haji tanpa antrre.
- Waspada itu perlu.

Berabe